



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 15 (lima belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 19 Februari 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas program 100 hari lengkap dengan indikator yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan visi Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas. 2. Membahas laporan perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI atas Percepatan Penurunan Stunting.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 32 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN; Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd beserta jajaran

## I. PENDAHULUAN

- Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dibuka pukul 10.25 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- Rapat dilanjutkan oleh Bapak M. Yahya Zaini, S.H./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI untuk memperjelas indikator keberhasilan dan sasaran program *Quick Wins*, serta melakukan inovasi dalam pelaksanaannya agar dapat dijalankan dengan lebih efektif dan dapat mengukur dampak nyata, khususnya dalam penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, guna menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam program-program yang berkaitan dengan penurunan stunting, pembangunan keluarga, serta pemberdayaan remaja dan lansia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI untuk meningkatkan penggunaan data yang lebih jelas dan berbasis hasil nyata dalam setiap program yang dijalankan, serta melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengukur dampak langsung terhadap penurunan stunting dan perbaikan kualitas kehidupan keluarga Indonesia.
4. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI memasukkan informasi tentang kesehatan reproduksi (kespro) dan seksualitas dalam program SuperApp, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan keluarga yang sehat dengan memberikan akses informasi yang tepat kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, guna memperkuat kesadaran mereka tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesejahteraan jangka panjang.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini paling lambat tanggal 26 Februari 2025.

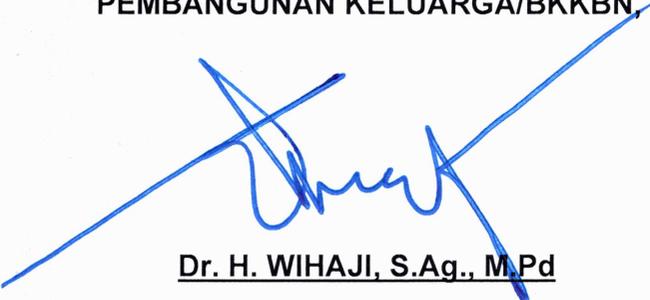
### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB.

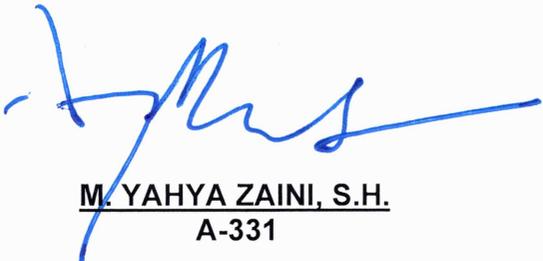
Jakarta, 19 Februari 2025

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN,**

**KETUA RAPAT,**



Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd



M. YAHYA ZAINI, S.H.  
A-331